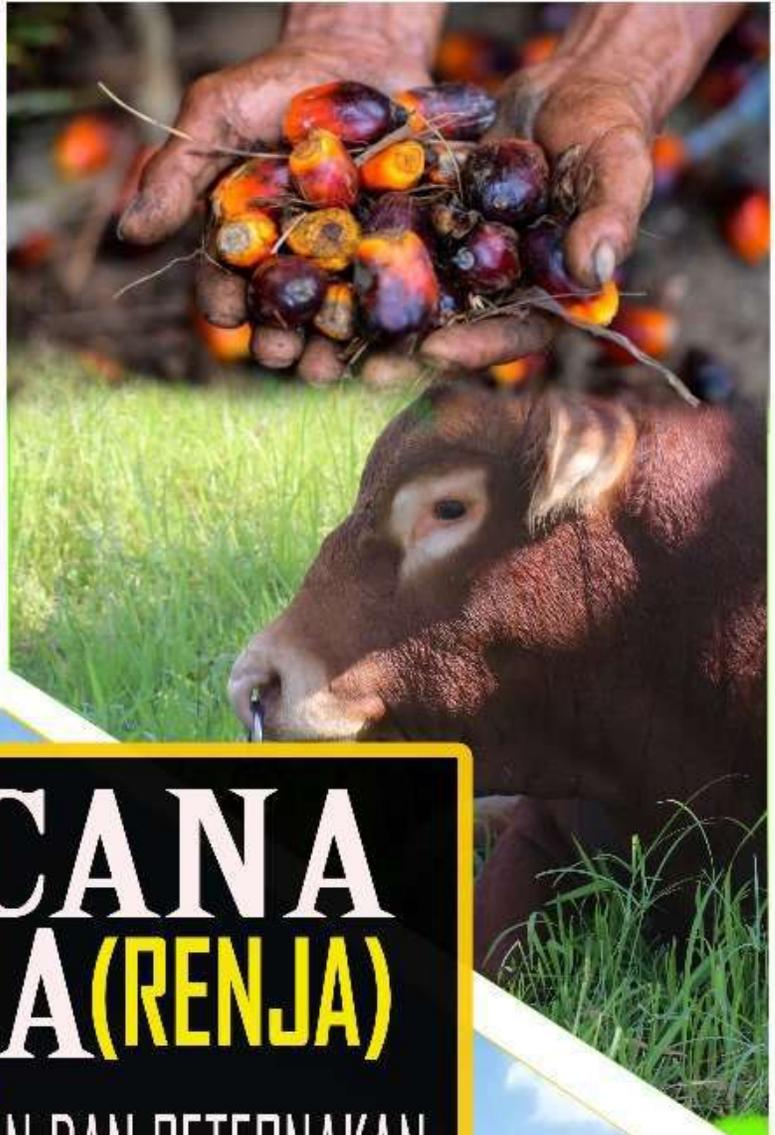




PEMERINTAHAN
PROVINSI
SUMATERA UTARA



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



**TAHUN
2025**



disbunak Sumut



www.disbunak.sumutprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Penyusunan Renja Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Renja ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Renja ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, target indikator kinerja serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara khususnya di bidang perkebunan dan peternakan.

Demikian Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini disusun untuk dipedomani.

Medan, 2024
KEPALA DINAS,

M. ZAKIR SYARIF DAULAY, S.Hut, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19761115 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT	
DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4. Review Terhadap RKPD	35
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	49
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	50
3.3. Program dan Kegiatan	54
3.4. Dukungan Perangkat Daerah terhadap Kegiatan Strategis Daerah (KSD).	54
3.5. Dukungan Perangkat Daerah terhadap Perencanaan Pendekatan Tematik.....	55
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	57
BAB V. PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. (Tabel T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.....	8
2.2. (Tabel T.C-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.....	20
2.3. Produksi Komoditi Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Ton).....	22
2.4. Luas Lahan Tanaman Tahunan per Komoditi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2023 (Ha).....	23
2.5. Produktivitas Komoditi Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Kg/ Ha).....	24
2.6. Target dan Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.....	26
2.7. Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Sumatera Utara Tahun 2019-2023.....	28
2.8. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.....	29
2.9. Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2019-2023.....	30
2.10. Populasi Ternak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.....	32
2.11. (Tabel T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara.....	36
3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025.....	52
3.2. Dukungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara terhadap Kegiatan Strategis Daerah.....	54
3.3. Dukungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara terhadap Penurunan Angka Stunting.....	55
3.4. Dukungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara terhadap Penurunan Angka Kemiskinan.....	56
4.1. (Tabel T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan Tahun 2019-2023.....	27
2.2. Nilai Tukar Perkebunan Sumatera Utara dan Nasional	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh karenanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsu Sumatera Utara disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, target indikator kinerja serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan Renja tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun dan disusun dengan mempedomani Renstra tersebut serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan perkebunan dan peternakan di Sumatera Utara sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodir pencapaian target dan sasaran yang tercantum di dalam

RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam RPD dan Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 16);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud disusunnya Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan pembangunan perkebunan dan peternakan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi pembangunan perkebunan dan peternakan di Sumatera Utara;
- b. Menetapkan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

2. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 bertujuan untuk:

- a. Merumuskan program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;

- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan perkebunan dan peternakan antar wilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota);
- c. Menjadi pedoman bagi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan RKA dan DPA tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu,

dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai realisasi tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review Terhadap RKPD

Berisikan tentang review terhadap RKPD terkait kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan beserta total kebutuhan dana/pagu indikatif.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, lokasi dan pagu indikatif.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana capaian masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 mendapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 95.045.322.055,- (Sembilan Puluh Lima Milyar empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua ribu Lima Puluh Lima Rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 92.243.420.160,17 (sembilan puluh dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus enam puluh ribu tujuh belas rupiah) atau sebesar 97,05 %. Adapun capaian secara rinci masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tahun lalu atau tahun 2023 (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 2024 (n-1) dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. (Tabel T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

No.	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN									
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan kinerja	12 Bulan		6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100 %	5 Laporan	5 Laporan	100 %
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas keuangan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/ Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	250 Orang/ Bulan	250 Orang/ Bulan	100 %
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

No.	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan Barang Milik Daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pegawai	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket		230 Paket	230 Paket	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang		14 Orang	14 Orang	100 %	250 Orang	250 Orang	100 %
3.27.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		-	-		60 Orang	60 Orang	100 %
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Layanan Sarana Aparatur	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	1 Paket	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	100 %	3 Paket	3 Paket	100 %
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %

No.	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan yang Disediakan	10.080 Dokumen		10.080 Dokumen	10.080 Dokumen	100 %	10.080 Dokumen	10.080 Dokumen	100 %
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	100 Unit		75 Unit	75 Unit	100 %	100 Unit	100 Unit	100 %
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Prasarana Aparatur	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit		6 Unit	6 Unit	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %

No.	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit		120 Unit	120 Unit	100 %	120 Unit	120 Unit	100 %
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit		1 Unit	1 Unit	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN SARANA PERKEBUNAN	1.300 Ha		1.900 Ha	1.900 Ha	100 %	1.300 Ha	1.300 Ha	100 %
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi alsintan dan pupuk	1.300 Ha		10 %	10 %	100 %	1.300 Ha	1.300 Ha	100 %
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi bibit tanaman	1.300 Ha		5 %	5 %	100 %	1.300 Ha	1.300 Ha	100 %
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)	2,11 %		-	-	100 %	2,11 %	2,11 %	100 %
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman	Jumlah Kelompok dan UPTD yang Difasilitasi	127 Unit		170 Unit	170 Unit	100 %	127 Unit	127 Unit	100 %

No.	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi									
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang diproduksi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1.000 Dokumen		-	-		1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	100 %
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH USAHA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG DIAWASI DAN DIBINA	10 %		-	-		10 %	10 %	100 %
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah Pengawasan peredaran obat Hewan di tingkat distributor	15 Unit		1 Laporan	1 Laporan	100 %	15 Unit	15 Unit	100 %
3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA POPULASI TERNAK (EKOR)	1,5 %		-	-		1,5 %	1,5 %	100 %
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Kelompok, UPTD dan Laboratorium yang Difasilitasi	33 Unit		-	-		33 Unit	33 Unit	100 %
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	1 Ha		-	-		1 Ha	1 Ha	100 %
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MAYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN	10 %		79 Poin	79 Poin	100 %	10 %	10 %	100 %

No.	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah hewan yang tertangan	74.500 Ekor		204.700 Ekor	204.700 Ekor	100 %	74.500 Ekor	74.500 Ekor	100 %
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	1 Wilayah		-	-	-	1 Wilayah	1 Wilayah	100 %
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIKENDALIKAN DAN DITANGANI	1.000 Ha		1.450 Ha	1.450 Ha	100 %	1.000 Ha	1.000 Ha	100 %
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luasan Area Penanganan Gangguan Usaha Luasan Area Penanganan OPT dan DPI	300 Ha 700 Ha		10%	10%	100 %	300 Ha 700 Ha	300 Ha 700 Ha	100 %
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	500 Ha		500 Ha	500 Ha	100 %	500 Ha	500 Ha	100 %
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	200 Ha		-	-	-	200 Ha	200 Ha	100 %

No.	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300 Ha		500 Ha	500 Ha	100 %	300 Ha	300 Ha	100 %
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH USAHA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG DIAWASI DAN DIBINA	10 %		-	-	--	10 %	10 %	100 %
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang Dibina dan Diawasi	840 Unit		-	-	-	840 Unit	840 Unit	100 %
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan pengawasan Penerapan Standard an Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawas	1 Laporan		-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KELOMPOK TANI YANG MENDAPAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	10 %		3.800 Orang	3.800 Orang	100 %	10 %	10 %	100 %
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penerapan teknologi dan inovasi perkebunan dan peternakan	15 Kegiatan		10%	10%	100 %	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100 %
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	12 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok petani yang difasilitasi IG, sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan dan peternakan	20 Kelompok		10%	10%	100 %	20 Kelompok	20 Kelompok	100 %

No.	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit		-	-	-	1 Unit	1 Unit	100 %
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	7 Unit		3 Unit	3 Unit	100 %	7 Unit	7 Unit	100 %
3.27.0.00.0.00.01.0006	UPTD PERBENIHAN									100 %
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN SARANA PERKEBUNAN	1.300 Ha		1.900 Ha	1.900 Ha	100 %	1.300 Ha	1.300 Ha	100 %
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Kebun Sumber Benih dan Penangkar Benih yang Diawasi	8 Unit		10 %	10 %	100 %	8 Unit	8 Unit	100 %
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN	401 Ha		401 Ha	401 Ha	100 %	401 Ha	401 Ha	100 %
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Kebun Produksi yang Terpelihara	17 Unit		10 %	10 %	100 %	17 Unit	17 Unit	100 %
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
3.27.0.00.0.00.01.0006	UPTD INSEMINASI BUATAN									

No.	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATARATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)	2,11 %		1,5 %	1,5 %	100 %	2,11 %	2,11 %	100 %
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kelahiran Ternak yang di Inseminasi Buatan	62 %		27 Kabupaten	27 Kabupaten	100 %	62 %	62 %	100 %
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.0.00.0.00.01.0008	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN	10 %		-	-	-	10 %	10 %	100 %
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengujian Sampel Produk Hewan	900 Sampel		-	-	%	900 Sampel	900 Sampel	100 %
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	200 Laporan		-	-	-	200 Laporan	200 Laporan	100 %
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

No.	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Unit Usaha yang diawasi	102 Unit Usaha		-	-	-	102 Unit Usaha	102 Unit Usaha	100 %
3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner NKV	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10 Sertifikat		-	-	-	10 Sertifikat	10 Sertifikat	100 %
3.27.0.00.0.00.01.0009	UPTD KLINIK HEWAN						-			
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN	10 %		-	-	-	10 %	10 %	100 %
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang tertangani di UPTD Klinik Hewan	4.000 Ekor		-	-	-	4.000 Ekor	4.000 Ekor	100 %
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	1 Laporan		-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.0.00.0.00.01.0010	UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA LOBUSONA									
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATARATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)	2,11 %		1,5 %	1,5 %	100 %	2,11 %	2,11 %	100 %
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Kelahiran Bibit Unggul di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona	80 %		80 %	80 %	100 %	80 %	80 %	100 %

No.	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2022)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program Dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
3.27.0.00.0.00.01.0011	UPTD TERNAK UNGGAS DAN SAPI SIHITANG									
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATARATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)	2,11 %		1,5 %	1,5 %	100 %	2,11 %	2,11 %	100 %
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Kelahiran Bibit Unggul di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona	80 %		80 %	80 %	100 %	80 %	80 %	100 %
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja utama. Data capaian persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat, jumlah produksi tanaman perkebunan, produktivitas komoditi perkebunan, produksi daging, produksi telur dan produksi susu pada tabel di atas merupakan Angka Sementara/ ASEM Tahun 2023 yang diperoleh dari kabupaten/ kota. Sedangkan capaian NTP sub sektor perkebunan, PDRB sub sektor Perkebunan dan NTP Peternakan merupakan angka tetap tahun 2023 yang diperoleh dari BPS Provinsi Sumatera Utara. Adapun masing-masing capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2.3. (Tabel T-C.30).

Tabel 2.2. (Tabel T.C-30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

No	Sasaran	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Rakyat	1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (PR) (%/Tahun)	-	-	3	-	-	-	1,06	-	-	-	
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (PR) (Ton)	-	-	8.422.484,98	-	-	-	8.459.681,19	-	-	-	
		Kelapa Sawit	-	-	7.788.108,75	-	-	-	7.873.627,27	-	-	-	
		Karet	-	-	326.928,00	-	-	-	310.100,00	-	-	-	
		Kopi Arabika	-	-	83.654,39	-	-	-	77.480,00	-	-	-	
		Kopi Robusta	-	-	14.845,52	-	-	-	10.400,00	-	-	-	
		Kelapa	-	-	109.300,38	-	-	-	102.387,45	-	-	-	
		Kakao	-	-	40.321,00	-	-	-	36.592,00	-	-	-	
		Komoditi Lainnya	-	-	59.326,94	-	-	-	49.094,47	-	-	-	
		2. Produktivitas Komoditi Perkebunan (%)	-	-	2,22	-	-	-	0,29	-	-	-	
2	Meningkatnya pendapatan petani pekebun	3. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perkebunan	-	-	154,19	-	-	-	159,89	-	-	-	
		4. Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (%)	-	-	13,27	-	-	-	13,92	-	-	-	
3	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	-	-	116,81	-	-	-	96,81	-	-	-	
		Produksi Daging (Ton)	-	-	259.395,90	-	-	-	277.221,71	-	-	-	
		Produksi Telur (Ton)	-	-	524.452,16	-	-	-	564.676,89	-	-	-	
		Produksi Susu (Ton)	-	-	9.819,33	-	-	-	9.234,42	-	-	-	

Berdasarkan data, terdapat tiga indikator kinerja utama yang tidak mencapai target yaitu Persentase Peningkatan Produksi tanaman perkebunan rakyat (PR), Produktivitas Komoditi Perkebunan dan Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan. Lima indikator kinerja utama lainnya yaitu Jumlah produksi Tanaman Perkebunan (Kelapa sawit, Karet, Kopi, Kakao, Kelapa dan Tanaman lainnya), NTP Sub Sektor Perkebunan, PDRB Sub Sektor Perkebunan, Produksi Daging, Produksi Telur dan Produksi Susu melebihi target yang telah ditetapkan. Analisis kinerja perangkat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produksi dan Produktivitas

Persentase Peningkatan Produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) dan Produktivitas Komoditi Perkebunan merupakan indikator kinerja utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Produksi dan produktivitas komoditas perkebunan yang menjadi sasaran adalah produksi dan produktivitas untuk 24 (dua puluh empat) komoditas perkebunan rakyat.

Produksi perkebunan adalah banyaknya hasil dari tanaman tahunan dan semusim yang diambil berdasarkan luas yang dipanen. Produksi perkebunan dapat dicapai dari 3 (tiga) jenis pengolahan perkebunan berdasarkan kepemilikan yaitu perkebunan swasta (PBSN dan PBSA), Perkebunan Negara (PTPN) dan Perkebunan Rakyat (PR). Produktivitas perkebunan adalah produksi perkebunan yang dibagi dengan luas tanaman menghasilkan (TM) untuk tanaman tahunan atau produksi perkebunan yang dibagi dengan luas panen untuk tanaman semusim.

Produksi, luas lahan dan produktivitas komoditas perkebunan secara keseluruhan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3. , Tabel 2.4. dan Tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.3.

Produksi Komoditi Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Ton)

No	Uraian/Komoditi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023*
I.	Perk. Besar Swasta					
1.	Karet	119.486,58	24.524,80	24.860,93	29.089,79	29.089,79
2.	Kelapa Sawit	12.574.520,68	11.361.158,60	11.361.950,00	12.335.139,77	12.335.139,77
3.	Kakao	133,00	79,44	133,89	126,61	126,61
4.	Kopi	-	-	-	25,52	25,52
5.	Teh	-	-	-	-	-
6.	Kelapa	-	-	-	-	-
	Jumlah I	12.694.140,26	11.385.762,84	11.386.944,82	12.364.381,69	12.364.381,69
II.	Perk. Negara					
1.	Karet	36.280,00	36.365,00	33.763,00	33.527,00	33.527,00
2.	Kelapa Sawit	5.541.934,78	5.500.327,63	5.809.316,15	5.780.373,00	5.780.373,00
3.	Kakao	-	-	-	-	-
4.	Tebu	18.725,49	19.832,91	22.742,74	25.813,22	25.813,22
5.	Tembakau	33,32	3,71	4,18	4,18	4,18
6.	Teh	8.317,99	9.241,96	9.637,00	9.324,00	9.324,00
	Jumlah II	5.605.291,58	5.565.771,21	5.875.463,07	5.849.041,40	5.849.041,40
III.	Perk. Rakyat					
1.	Karet	309.973,00	310.016,00	310.018,00	310.020,00	310.100,00
2.	Kelapa Sawit	7.006.986,36	7.199.750,00	7.451.890,91	7.789.009,09	7.873.627,27
3.	Kopi Arabika	66.831,00	67.469,00	71.588,00	76.528,00	77.480,00
4.	Kopi Robusta	8.091,00	9.128,00	9.283,00	9.922,00	10.400,00
5.	Kelapa	99.132,00	99.972,00	100.036,00	101.964,96	102.387,45
6.	Kakao	34.792,00	35.696,00	36.310,00	35.299,43	36.592,00
7.	Cengkeh	1.097,00	1.814,00	2.028,69	2.219,00	2.276,03
8.	Kemenyan	8.481,00	8.604,00	8.845,00	8.967,00	9.095,00
9.	Kulit Manis	3.792,00	4.012,00	4.329,00	4.635,00	4.706,00
10.	Kemiri	13.529,40	13.805,00	13.980,00	14.232,00	14.266,00
11.	Pala	89	112,00	117,00	153,60	162,00
12.	Lada	87	206,00	219,00	237,00	243,09
13.	Kapuk	191	208,00	223,00	163,00	170,68
14.	Gambir	1.368,00	1.509,00	1.634,00	1.823,00	2.093,00
15.	Aren	6.100,00	6.619,00	7.236,00	7.518,00	7.879,00
16.	Pinang	4.113,00	4.358,00	4.613,00	4.966,00	5.170,00
17.	Vanili	84	106,00	126,00	166,00	170,27
18.	Jarak	18	30,00	39,00	43,00	44,11
19.	Kapulaga	13	27,00	39,00	47,00	48,21
20.	Sereh Wangi	211	231,00	266,00	246,00	249,00
21.	Nilam	296	336,00	344,00	334,00	343,00
22.	Tembakau	1.405,01	1.737,00	1.751,00	1.832,00	1.879,08
23.	Tebu	3.315,93	960,00	19,00	-	-
24.	Andalima	-	-	165,27	324,00	300,00
	Jumlah III	7.569.995,70	7.766.705,00	8.025.099,87	8.370.649,08	8.459.681,19

Keterangan : Produksi kelapa sawit dalam bentuk TBS

* Angka Sementara

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, 2024

Tabel 2.4.

Luas Lahan Tanaman Tahunan per Komoditi di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2022-2023 (Ha)

No	Uraian/Komoditi	Tahun							
		2022				2023			
		TBM	TM	TTM	Total	TBM	TM	TTM	Total
I.	Perk. Besar Swasta								
1.	Karet	7.453,39	36.152,13	168,73	43.774,25	7.453,39	36.152,13	168,73	43.774,25
2.	Kelapa Sawit	115.978,06	440.642,09	11.424,16	568.044,31	115.978,06	440.642,09	11.424,16	568.044,31
3.	Kakao	-	186,40	-	186,40	-	186,40	-	186,40
4.	Kopi	39,58	156,11	-	195,69	39,58	156,11	-	195,69
5.	Teh	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kelapa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah I	123.471,03	477.136,73	11.592,89	612.200,65	123.471,03	477.136,73	11.592,89	612.200,65
II.	Perk. Negara								
1.	Karet	1.133,91	30.096,72	-	31.230,63	1.133,91	30.096,72	-	31.230,63
2.	Kelapa Sawit	26.972,64	248.056,03	46.206,23	321.234,90	26.972,64	248.056,03	46.206,23	321.234,90
3.	Kakao	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tebu	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tembakau	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Teh	27,53	3495,15	2593,69	6.116,37	27,53	3495,15	2593,69	6.116,37
	Jumlah II	28.134,08	281.647,90	48.799,92	358.581,90	28.134,08	281.647,90	48.799,92	358.581,90
III.	Perk. Rakyat								
1.	Karet	43.420,00	270.776,00	55.196,00	369.392,00	43.420,00	270.776,00	55.196,00	369.392,00
2.	Kelapa Sawit	77.412,46	406.113,23	6.637,82	490.163,51	77.725,00	406.427,00	6.235,00	490.387,00
3.	Kopi Arabika	17.363,50	57.634,70	5.022,70	80.020,90	17.552,00	57.849,00	5.030,00	80.431,00
4.	Kopi Robusta	1.559,00	10.572,00	5.702,00	17.833,00	1.632,00	10.669,00	5.706,00	18.007,00
5.	Kelapa	9.833,00	91.193,00	10.152,00	111.178,00	9.756,00	91.582,00	10.109,00	111.447,00
6.	Kakao	12.772,35	35.504,50	4.613,48	52.890,33	12.881,00	35.804,00	4.537,48	53.222,48
7.	Cengkeh	663,00	2.373,00	662,00	3.698,00	729,00	2.506,00	653,00	3.888,00
8.	Kemenyan	1.072,00	19.374,40	2.782,00	23.228,40	1.121,00	19.418,00	2.783,00	23.322,00
9.	Kulit Manis	1.233,50	3.898,10	915,00	6.046,60	1.291,00	3.918,00	916,00	6.125,00
10.	Kemiri	972,00	9.240,00	564,00	10.776,00	996,00	9.273,00	562,00	10.831,00
11.	Pala	63,10	168,80	31,00	262,90	63,00	187,00	30,00	280,00
12.	Lada	57,00	196,00	18,00	271,00	82,00	231,00	18,00	331,00
13.	Kapuk	92,00	362,00	90,00	544,00	109,00	375,00	90,00	574,00
14.	Gambir	249,00	1.343,00	128,00	1.720,00	275,00	1.349,00	128,00	1.752,00
15.	Aren	2.150,70	4.243,00	845,75	7.239,45	2.259,00	4.333,00	847,00	7.439,00
16.	Pinang	1.492,00	4.700,00	383,00	6.575,00	1.603,00	4.828,00	387,00	6.818,00
17.	Vanili	62,00	166,00	15,00	243,00	68,00	173,00	15,00	256,00
18.	Jarak	19,00	29,00	3,00	51,00	21,00	30,00	3,00	54,00
19.	Kapulaga	45,00	35,00	-	80,00	45,00	43,00	-	88,00
20.	Andaliman	56,10	244,00	49,90	350,00	101,00	289,00	49,00	439,00
	Jumlah	170.586,71	918.165,73	93.810,65	1.182.563,09	171.729,00	920.060,00	93.294,48	1.185.083,48

Tabel 2.5.
Produktivitas Komoditi Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023 (Kg/ Ha)

No	Uraian/Komoditi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023*
I.	Perkebunan Besar Swasta					
1.	Karet	1.647,07	472,35	506,00	804,65	804,65
2.	Kelapa Sawit	23.357,05	21.045,98	21.706,36	27.993,56	27.993,56
3.	Kakao	627,36	426,19	718,29	679,24	679,24
4.	Kopi	-	-	-	163,47	163,47
5.	Teh	-	-	-	-	-
6.	Kelapa	-	-	-	-	-
II.	Perkebunan Negara					
1.	Karet	1.359,63	1.258,29	1.090,06	1.113,98	1.113,98
2.	Kelapa Sawit	21.638,07	21.213,38	22.360,43	23.302,69	23.302,69
3.	Kakao	-	-	-	-	-
4.	Tebu	3.340,86	3.998,94	5.285,40	3.376,49	3.376,49
5.	Tembakau	757,27	927,50	1.045,00	1.045,00	1.045,00
6.	Teh	2.071,24	2.254,39	2.324,13	2.667,70	2.667,70
III.	Perkebunan Rakyat					
1.	Karet	1.144,76	1.144,92	1.144,92	1.144,93	1.145,23
2.	Kelapa Sawit	18.273,20	18.743,44	19.368,99	19.179,40	19.372,80
3.	Kopi Arabika	1.203,08	1.213,67	1.251,59	1.327,81	1.339,35
4.	Kopi Robusta	778,80	875,25	883,84	938,52	974,79
5.	Kelapa	1.096,36	1.104,69	1.104,88	1.118,12	1.117,99
6.	Kakao	947,55	971,21	986,71	994,22	1.022,01
7.	Cengkeh	493,92	809,46	891,32	935,10	908,23
8.	Kemenyan	438,61	444,90	457,04	462,83	468,38
9.	Kulit Manis	1.010,39	1.064,19	1.139,21	1.189,04	1.201,12
10.	Kemiri	1.485,93	1.513,21	1.527,53	1.540,26	1.538,44
11.	Pala	723,58	881,89	860,29	909,95	866,31
12.	Lada	568,63	1.240,96	1.203,30	1.209,18	1.052,34
13.	Kapuk	552,02	592,59	624,65	450,28	455,15
14.	Gambir	1.057,19	1.161,66	1.245,43	1.357,41	1.551,52
15.	Aren	1.491,81	1.605,00	1.736,92	1.771,86	1.818,37
16.	Pinang	919,93	968,66	1.009,41	1.056,60	1.070,84
17.	Vanili	656,25	768,12	875,00	1.000,00	984,22
18.	Jarak	1.058,82	1.500,00	1.950,00	1.482,76	1.470,33
19.	Kapulaga	1.181,82	1.928,57	2.052,63	1.342,86	1.121,16
20.	Sereh Wangi	400,38	427,78	453,92	373,86	366,72
21.	Nilam	356,20	370,45	375,14	361,86	356,18
22.	Tembakau	858,55	982,47	990,38	988,13	1.002,18
23.	Andaliman	-	-	684,97	1.327,87	1.038,06
24.	Tebu	2.747,25	1.000,00	3.166,67	-	-

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, 2024

Capaian persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan tahun 2023 dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja dikategorikan rendah atau mencapai 35,33 %. Masih rendahnya capaian persentase peningkatan produksi merata pada semua komoditi kecuali kelapa sawit. Secara umum hal ini dipengaruhi oleh : 1) Belum tersedianya angka tetap data produksi tanaman perkebunan, 2) banyaknya tanaman perkebunan yang belum menghasilkan; 3) kurangnya pemupukan karena tingginya harga pupuk; dan 4) masih terdapat kasus hama penyakit tanaman perkebunan.

Capaian produksi kelapa sawit jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Sangat Tinggi atau mencapai 101,10 %. Dalam peningkatan produksi kelapa sawit Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provins Sumatera Utara melaksanakan kegiatan antara lain: 1) menjamin keberlanjutan usaha perkebunan sawit dengan ikut serta dalam Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan; 2) pembinaan usaha dalam bentuk fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR); pelatihan dan sertifikasi ISPO; rintisan penerbitan STDB; 3) penetapan harga TBS bersama tim.

Capaian produksi karet jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Tinggi atau mencapai 94,85%. Dalam peningkatan produksi karet, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provins Sumatera Utara memberikan bantuan prasarana berupa fasilitasi pengolahan pasca panen.

Capaian produksi kopi Arabika jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Sangat Tinggi atau mencapai 92,62%. Produksi kopi Arabika dalam bentuk biji kering. Dalam peningkatan produksi kopi Arabika, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provins Sumatera Utara memberikan bantuan bibit kopi, pupuk dan pestida hayati; penyuluhan budidaya kopi; bimbingan teknis pengendalian hama terpadu; bantuan alat pasca panen; pembentukan dan pembinaan petani milenial. Capaian Produksi kopi Robusta jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Tinggi atau mencapai 70,05%. Produksi kopi robusta dalam bentuk biji kering. Dalam peningkatan produksi kopi Arabika, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provins Sumatera Utara memberikan bantuan berupa pemberian bantuan bibit kopi, pupuk dan pestida hayati; penyuluhan budidaya kopi; bimbingan teknis pengendalian hama terpadu; bantuan alat pasca panen; pembentukan dan pembinaan petani milenial.

Capaian produksi kelapa jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Sangat Tinggi atau mencapai 93,68 %. Produksi kelapa dalam bentuk kopra. Dalam peningkatan produksi kelapa, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provins Sumatera Utara memberikan bantuan berupa pemberian bantuan bibit, pupuk dan pestida hayati; penyuluhan budidaya kelapa; bimbingan teknis pengendalian hama terpadu.

Capaian produksi kakao jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Tinggi atau mencapai 82,75 %. Produksi kakao dalam bentuk biji kering. Dalam peningkatan produksi kakao, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provins Sumatera Utara memberikan bantuan berupa pemberian bantuan bibit, pupuk dan pestida hayati; penyuluhan budidaya kakao; bimbingan teknis pengendalian hama terpadu.

Capaian Produksi pada komoditi lainnya jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Tinggi atau mencapai 82,75 %. Dalam peningkatan komoditi lainnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provins Sumatera Utara memberikan perhatian pada komoditi yang memiliki potensi cukup besar dan diminati Masyarakat seperti cengkeh, andaliman, aren dan tembakau. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provins Sumatera Utara memberikan bantuan berupa

bantuan bibit pupuk dan pestida hayati; penyuluhan budidaya tanaman; bimbingan teknis pengendalian hama terpadu.

Capaian Produktivitas komoditi Perkebunan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Rendah atau mencapai 13,18 %. Masih rendahnya capaian produktivitas komoditi Perkebunan merata pada semua komoditi kecuali kelapa sawit, dan beberapa komoditi lainnya (jarak, kapulaga, andaliman, nilam dan tembakau). Hal ini dipengaruhi oleh: 1) Belum tersedianya angka tetap data produksi tanaman perkebunan, 2) Meningkatnya luas lahan tanaman menghasilkan lebih tinggi dibandingkan jumlah produksi yang disebabkan oleh replanting dan sisipan tanaman Perkebunan pada lahan tanaman menghasilkan; 3) kurangnya pemupukan karena tingginya harga pupuk; 4) masih terdapat kasus hama penyakit tanaman perkebunan.

2. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perkebunan

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator kesejahteraan petani yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib). Melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dapat dilihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani, begitu juga sebaliknya.

Kesejahteraan petani khususnya dari subsektor perkebunan dapat diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Pada tabel 2.6. dapat dilihat target dan realisasi NTP Perkebunan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2. 6.

Target dan Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Tahun 2019-2023
Provinsi Sumatera Utara

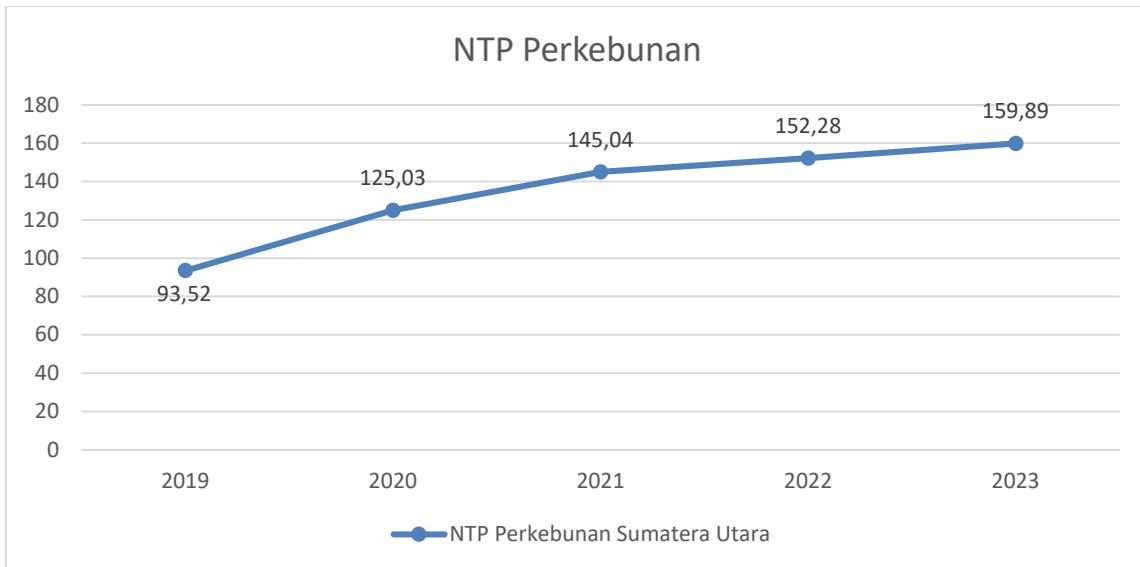
Subsektor	Target NTP Perkebunan					Realisasi NTP Perkebunan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tanaman Perkebunan	-	-	100,01	100,51	154,19	93,52	125,03	145,04	152,28	159,89

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023 (data diolah)

Keterangan : *) Target pada P. Renja Tahun 2023

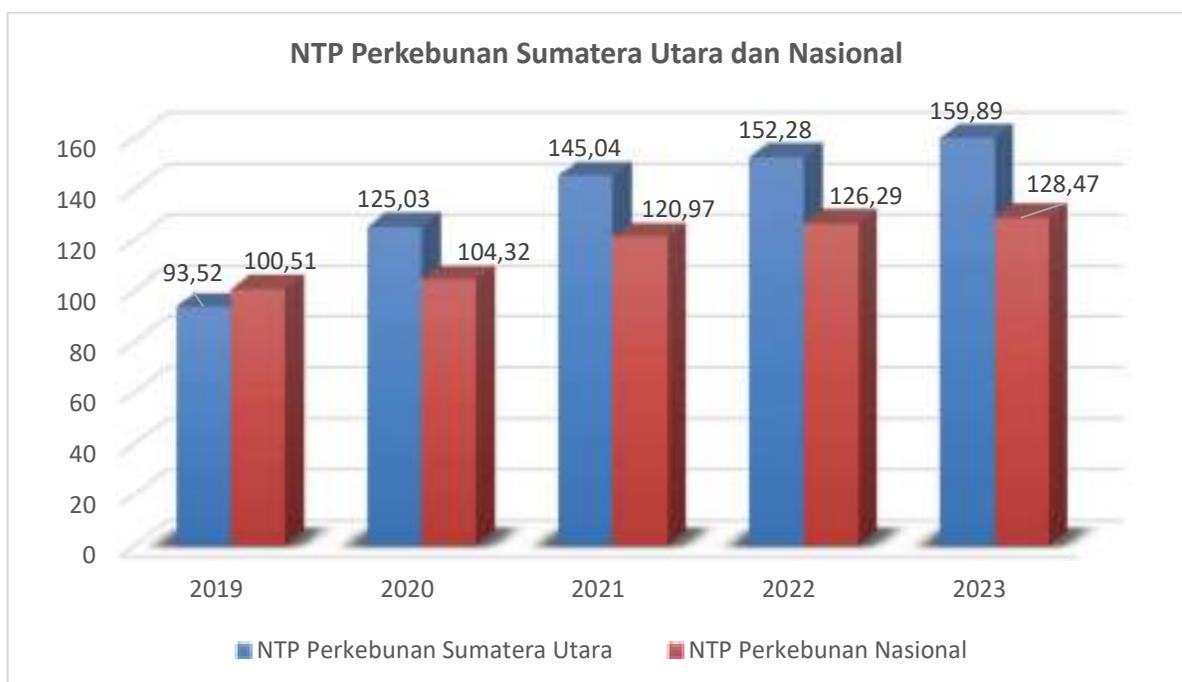
Berdasarkan tabel 2.6. NTP perkebunan terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, dimana tahun 2020 sampai dengan 2023 NTP Perkebunan lebih besar dari 100. Hal ini menunjukkan petani pekebun di Sumatera Utara mengalami surplus. Terjadinya surplus dikarenakan indeks yang diterima petani (It) mengalami peningkatan dimana peningkatan tersebut lebih besar dari peningkatan indeks yang dibayar oleh petani (Ib). Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) untuk Sub sektor Perkebunan (point) jika dibandingkan

dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Tinggi atau mencapai 103,70 %. Dalam peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) untuk Sub sektor Perkebunan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan antara lain Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provins Sumatera Utara melaksanakan Upaya peningkatan produksi, produktivitas komoditi Perkebunan, pembinaan usaha Perkebunan dan pengendalian serta penanggulangan bencana pertanian.



Gambar 2.1. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan Tahun 2019-2023

Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan di Sumatera Utara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 berada di atas rata-rata NTP Perkebunan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2.2 Nilai Tukar Perkebunan Sumatera Utara dan Nasional

3. Kontribusi PDRB (%)

Pembangunan sub sektor perkebunan di Sumatera Utara merupakan bagian pembangunan sektor pertanian, kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian dan terhadap PDRB Sumatera Utara tidak bisa dikesampingkan karena telah mencapai angka yang tidak sedikit. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sub sektor perkebunan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan ekonomi Sumatera Utara. Adapun kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB Sumatera Utara Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.7. berikut:

Tabel 2.7.
Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Sumatera Utara
Tahun 2019-2023

PDRB	Realisasi PDRB				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Total	799.608,95	811.188,31	859.870,26	955.193,09	1.050.995,41
PDRB Sub Sektor Perkebunan	79.001,99	86.501,67	102.036,81	125.753,78	146.345,48
Kontribusi Sub Sektor Perkebunan	9,88	10,66	11,87	13,17	13,92
Pertumbuhan (%)	7,21	9,49	6,84	7,54	3,79

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024

Capaian PDRB sub sektor perkebunan jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Tinggi atau mencapai 104,89%. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provins Sumatera Utara melaksanakan kegiatan antara lain peningkatan produksi, produktivitas komoditi Perkebunan, pembinaan usaha Perkebunan dan pengendalian serta penanggulangan bencana pertanian dengan harapan memberikan kontribusi terhadap PDRB.

4. Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan

Nilai Tukar Petani merupakan indikator kesejahteraan petani, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib). Mulai Januari 2020, penyusunan NTP menggunakan tahun dasar 2018=100

Arti angka NTP adalah sebagai berikut :

- a. NTP > 100, petani mengalami surplus. Hal ini terjadi ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.
- b. NTP = 100, petani tidak mengalami impas/break even. Hal ini terjadi ketika perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar.

- c. $NTP < 100$, petani mengalami defisit. Hal ini terjadi ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.

Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.8. berikut :

Tabel 2.8.

Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan Tahun 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)	114,91	98,74	103,08	101,13	96,81

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara, 2024, diolah

Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) untuk sub sektor Peternakan (point) jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Tinggi atau mencapai 82.88%. Untuk meningkatkan NTP Sub Sektor Peternakan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provins Sumatera Utara melaksanakan upaya peningkatan produksi ternak, pembinaan usaha Peternakan dan pengendalian serta penanggulangan penyakit hewan.

5. Produksi Daging, Telur dan Susu

Dalam rangka pembangunan menuju swasembada pangan hewani dilaksanakan beberapa upaya terutama dalam hal meningkatkan target produksi. Selain itu peningkatan produksi juga mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan. Adapun capaian produksi daging, telur dan susu di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel 2.9. berikut:

Tabel 2.9.
Produksi Daging, Telur dan Susu Tahun 2019-2023

Jenis Ternak	Produksi				
	2019	2020	2021	2022	2023*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Daging (Kg)					
Sapi potong lokal	14.153.161,00	10.355.952,13	10.273.590,38	12.197.151,50	12.336.602,08
Sapi Eks Impor (BX)	-	2.605.056,23	3.471.473,43	3.129.446,84	3.566.220,76
Sapi Perah	-	-	-	-	-
Kerbau Potong/Perah	1.738.612,00	1.685.708,40	2.185.202,67	2.048.712,09	1.963.453,79
Kambing Potong/Perah	1.118.443,00	848.735,61	900.980,56	884.983,64	861.820,33
Domba	605.795,00	498.140,16	563.793,84	748.550,14	757.305,72
Babi	49.123.960,00	11.665.422,28	11.136.869,32	10.944.678,84	11.637.874,59
Kuda	41.820,00	47.047,50	38.745,00	53.197,50	51.813,75
Ayam Buras	18.504.902,00	15.102.415,24	16.490.142,11	15.765.452,78	14.639.838,29
Ayam Ras Petelur/Afkir	18.512.511,00	3.899.207,94	4.357.301,12	4.284.390,03	4.616.165,74
Ayam Ras Petelur Pejantan	-	15.163.419,15	16.944.876,63	16.661.321,82	17.951.561,10
Ayam ras Pedaging	55.650.247,00	153.757.917,78	162.133.879,00	179.840.714,61	206.539.867,90
Itik	2.141.629,00	1.990.166,44	1.951.003,23	1.971.563,18	1.995.541,13
Itik Manila	457.750,00	371.452,40	273.777,90	222.436,50	230.017,70
Puyuh	49.274,00	86.313,92	68.916,76	67.501,06	67.981,76
Kelinci	4.927,00	6.533,17	6.481,31	5.423,78	5.645,67
Jumlah	162.103.031,00	218.083.488,35	230.797.033,26	248.825.524,31	277.221.710,31
Telur (Kg)					
Ayam Buras	12.683.736,00	11.596.284,54	12.661.838,99	12.264.389,69	11.687.700,63
Ayam Ras Petelur/Afkir	235.220.490,00	443.760.313,00	453.118.876,00	490.811.575,67	539.082.656,72
Itik	11.922.266,00	11.052.499,89	10.835.010,46	11.242.524,44	11.456.485,47
Itik Manila	3.807.725,00	3.089.815,92	2.277.339,84	1.850.250,78	1.913.319,90
Puyuh	388.378,00	680.310,63	543.189,37	532.903,12	536.698,11
Jumlah	264.022.595,00	470.179.223,98	479.436.254,66	516.701.643,70	564.676.860,83
Susu (Kg)					
Sapi Perah (Laktasi)	3.489.840,00	5.150.723,76	8.745.015,69	8.953.310,97	9.234.424,96
Jumlah	3.489.840,00	5.150.723,76	8.745.015,69	8.953.310,97	9.234.424,96

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, 2024

Capaian produksi daging jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Tinggi atau mencapai 106,87%. Untuk meningkatkan Produksi daging, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara melaksanakan penyebaran bibit ternak, optimalisasi inseminasi buatan, pengembangan instalasi pembibitan ternak, fasilitasi pengolahan pakan ternak, fasilitasi rumah potong hewan, penyediaan alat pengolahan hasil alat peternakan, pembinaan usaha Peternakan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Capaian produksi telur jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Tinggi atau mencapai 107,67%. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provins Sumatera Utara melaksanakan penyebaran bibit ternak, pengembangan instalasi pembibitan ternak, penyediaan alat pengolahan hasil alat peternakan, pembinaan usaha Peternakan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Capaian produksi susu jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2023 dikategorikan Tinggi atau mencapai 100,957%. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara melaksanakan penyebaran bibit ternak, fasilitasi pengolahan pakan ternak, penyediaan alat pengolahan hasil alat peternakan, pembinaan usaha Peternakan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Dinas Perkebunan dan Peternakan akan terus melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan NTP Peternakan dan produksi (daging, susu dan telur), antara lain melalui pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani/ peternak.

Capaian perkembangan populasi ternak fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan, dan ada juga yang mengalami penurunan. Perkembangan populasi ternak dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.10.

Populasi Ternak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Ternak	Populasi (ekor)				
		2019	2020	2021	2022	2023*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sapi potong	872.411	891.273	919.850	931.455	939.873
2	Sapi potong Eks Impor (BX)	-	8.298	16.038	17.250	22.368
3	Sapi Perah	4.847	4.953	5.164	5.287	5.453
4	Kerbau Potong	102.574	94.432	93.469	82.176	84.014
5	Kerbau Perah	-	1.072	745	786	801
6	Kambing Potong	867.817	638.265	660.904	574.617	510.668
7	Kambing Perah	-	4.064	4.795	5.383	4.875
8	Domba	729.146	725.563	768.261	778.816	758.058
9	Babi	1.073.198	178.525	162.522	211.400	239.712
10	Kuda	1.394	1.107	1.023	864	904
11	Ayam Buras	15.520.968	14.190.265	15.494.174	15.007.819	14.302.130
12	Ayam Ras Petelur	26.252.287	30.365.951	33.933.461	33.365.620	35.949.423
13	Ayam ras Pedaging	65.965.178	139.447.786	147.044.203	152.643.069	177.001.048
14	Itik	2.486.913	2.305.486	2.260.119	2.345.124	2.389.755
15	Itik Manila	693.575	562.808	414.816	337.022	348.510
16	Puyuh	223.978	392.336	313.258	306.823	309.008
17	Kelinci	10.427	13.936	13.824	11.570	12.042
	Total	114.804.713	189.826.120	202.106.626	206.625.081	232.878.642

Keterangan : *) Angka Sementara

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, 2024

Peningkatan populasi ternak ditopang oleh penyediaan bibit ternak unggul, peningkatan inseminasi buatan, pemberian bahan pakan berkualitas, dan pengendalian kesehatan hewan. Penyediaan bibit unggul diharapkan dapat meningkatkan jumlah ternak yang berkualitas yang beredar di masyarakat. Penyebaran ternak berkualitas terus dilakukan secara massif dan berkelanjutan sehingga berdampak pada populasi ternak di masyarakat.

Peningkatan populasi ternak, khususnya peningkatan kelahiran sapi dilakukan dengan cara inseminasi buatan (IB). Inseminasi Buatan atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. UPTD Inseminasi Buatan melakukan inseminasi kepada ternak milik masyarakat, sehingga diharapkan dapat melahirkan ternak sapi yang unggul.

Selain penyebaran ternak dan peningkatan kelahiran ternak melalui inseminasi buatan, peningkatan populasi ternak juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas kesehatan hewan. Peningkatan kualitas kesehatan hewan berbanding lurus dengan peningkatan populasi ternak khususnya dalam menekan tingkat mortalitas. Untuk menekan

tingkat mortalitas maka diupayakan langkah strategis berupa vaksinasi yang tepat, sanitasi yang reguler, serta pengobatan yang tepat waktu.

Untuk mendukung peningkatan produktivitas daging, selain peningkatan populasi dengan bibit unggul, juga dilakukan pemberian pakan ternak yang berkualitas. Pakan ternak yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan bobot ternak yang pada akhirnya dapat meningkatkan rasio produksi terhadap target.

Produksi pangan asal hewan juga dilakukan pengawasan secara berkala dan seksama guna menjamin kualitas dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Selain pengawasan mutu pangan asal hewan, penjaminan kualitas dan mutu pangan dilakukan dengan cara peningkatan kompetensi juru sembelih halal, pengendalian dan pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH), pengawasan kios daging, dan sosialisasi penerapan higienitas, sanitasi dan kesejahteraan hewan.

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
2. Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sekretariat, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis sekretariat, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis sekretariat, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;
 - d. Pelaksanaan administrasi teknis sekretariat, perkebunan, pembinaan usaha, peternakan, perlindungan dan kesehatan hewan sesuai dengan bidang lingkungannya;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kinerja Pelayanan PD, kebijakan dan strategi dalam membangun perkebunan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD berdasarkan evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan dan isu-isu yang berkembang maka permasalahan utama pada sub sektor perkebunan dan peternakan di Sumatera Utara antara lain:

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan rakyat
2. Belum optimalnya produksi ternak

3. Kurangnya fasilitasi peningkatan usaha petani
4. Tingginya kehilangan hasil produksi komoditas perkebunan dan populasi ternak

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah merupakan faktor yang berasal dari luar/eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Adapun tantangan dan peluang dalam pembangunan Perkebunan dan Peternakan di Sumatera Utara, sebagai berikut:

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan dan peternakan di Sumatera Utara antara lain :

- a. Pertambahan Penduduk
- b. Era Globalisasi yang Menuntut Daya Saing Tinggi
- c. Perubahan iklim
- d. Adanya ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
- e. Penurunan angkatan kerja

2. Peluang

Peluang yang mendukung pembangunan perkebunan dan peternakan di Sumatera Utara antara lain sebagai berikut:

- a. Sumatera Utara sebagai sentra produksi pertanian
- b. Pangsa pasar yang cukup luas untuk hasil perkebunan dan peternakan
- c. Kemitraan dan Kerjasama dengan pihak swasta atau pihak lain
- d. Perkembangan teknologi
- e. Adanya dukungan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam memajukan sub sektor perkebunan dan peternakan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Sumatera Utara; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Sumatera Utara; dan (5) KLHS RPJMD.

Jika dikaitkan dengan kondisi perkebunan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis antara lain :

1. Sarana perkebunan dan peternakan yang kurang memadai
2. Prasarana perkebunan dan peternakan yang kurang memadai
3. Terbatasnya jumlah dan kompetensi pekebun/peternak masyarakat
4. Kurangnya nilai tambah dan pemasaran hasil produk perkebunan dan peternakan
5. Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

6. Masih tingginya kasus penyakit hewan

2.4 Review Terhadap RKPD

Analisa kajian terhadap RKPD Provinsi Sumatera Utara dilakukan untuk membandingkan antara RKPD dengan hasil kebutuhan. Kajian ini dimaksudkan untuk menggambarkan skala prioritas primer, sekunder dan tersier program dan kegiatan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Penyusunan review ini dimulai dengan merumuskan rencana program dan kegiatan dari masing-masing unit Eselon III yang dilanjutkan dengan menjabarkan rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah kedalam Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan rencana kerja tersebut, maka akan diajukan dan untuk disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana kerja yang telah disusun dan selanjutnya ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Hasil review terhadap RKPD Tahun 2025 tidak ditemukan adanya perbedaan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang ada pada RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan.

Tabel 2.11. (Tabel T-C. 31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN					DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN					
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI		98.074.016.793	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI		98.074.016.793	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan kinerja	100 %	56.556.339.053	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan kinerja	100 %	56.556.339.053	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.359.496.585	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.359.496.585	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	446.413.715	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	446.413.715	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas keuangan	5 Laporan	913.082.870	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas keuangan	5 Laporan	913.082.870	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	37.402.038.430	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	37.402.038.430	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Orang/ Bulan	36.629.984.430	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Orang/ Bulan	36.629.984.430	
3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	638.284.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	638.284.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	133.770.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	133.770.000	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	92.998.080	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Bulan	92.998.080	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pegawai	1 Laporan	92.998.080	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pegawai	1 Laporan	92.998.080	
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 Bulan	879.372.180	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 Bulan	879.372.180	
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Paket	256.044.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Paket	256.044.000	
3.27.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	463.097.180	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 Orang	463.097.180	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Layanan Sarana Aparatur	60 Orang	160.231.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Layanan Sarana Aparatur	60 Orang	160.231.000	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	2.074.199.852	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	2.074.199.852	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	46.937.890	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	46.937.890	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	728.847.230	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	728.847.230	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan yang Disediakan	2 Paket	101.942.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan yang Disediakan	2 Paket	101.942.200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.080 Dokumen	44.640.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.080 Dokumen	44.640.000	
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	704.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	704.000.000	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Dokumen	447.832.532	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Dokumen	447.832.532	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	12 Bulan	1.582.897.481	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	12 Bulan	1.582.897.481	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Unit	1.582.897.481	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Unit	1.582.897.481	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	9.606.789.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	9.606.789.000	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	700.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	700.000.000	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Prasarana Aparatur	1 Laporan	8.906.789.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Prasarana Aparatur	1 Laporan	8.906.789.000	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	3.558.547.445	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	3.558.547.445	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	599.688.070	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	599.688.070	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	120 Unit	78.750.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	120 Unit	78.750.000	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN SARANA PERKEBUNAN	5 Unit	2.880.109.375	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN SARANA PERKEBUNAN	5 Unit	2.880.109.375	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi alsintan dan pupuk	1.300 Ha	9.356.425.261	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi alsintan dan pupuk	1.300 Ha	9.356.425.261	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1.300 Ha	4.067.333.811	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1.300 Ha	4.067.333.811	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi bibit tanaman	1 Laporan	4.067.333.811	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi bibit tanaman	1 Laporan	4.067.333.811	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1.300 Ha	5.289.091.450	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1.300 Ha	5.289.091.450	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN		PERSENTASE KENAIKAN RATA-	1 Laporan	5.289.091.450	PROGRAM PENYEDIAAN DAN		PERSENTASE KENAIKAN RATA-	1 Laporan	5.289.091.450	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		RATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)			PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		RATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)			
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Kelompok dan UPTD yang Difasilitasi	2,11 %	11.252.944.274	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Jumlah Kelompok dan UPTD yang Difasilitasi	2,11 %	11.252.944.274	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang diproduksi	127 Unit	11.252.944.274	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang diproduksi	127 Unit	11.252.944.274	
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Laporan	11.127.944.484	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Laporan	11.127.944.484	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH USAHA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG DIAWASI DAN DIBINA	1.000 Dokumen	124.999.790	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH USAHA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG DIAWASI DAN DIBINA	1.000 Dokumen	124.999.790	
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		Jumlah Pengawasan peredaran obat Hewan di tingkat distributor	10 %	197.212.574	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		Jumlah Pengawasan peredaran obat Hewan di tingkat distributor	10 %	197.212.574	
3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	15 Unit	197.212.574	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	15 Unit	197.212.574	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA POPULASI TERNAK (EKOR)	1 Laporan	197.212.574	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA POPULASI TERNAK (EKOR)	1 Laporan	197.212.574	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Kelompok, UPTD dan Laboratorium yang Difasilitasi	1,5 %	984.933.640	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Kelompok, UPTD dan Laboratorium yang Difasilitasi	1,5 %	984.933.640	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Provinsi/ Kab./Kota	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	33 Unit	984.933.640	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Provinsi/ Kab./Kota	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	33 Unit	984.933.640	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MAYARAKAT VETERINER		PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN	1 Ha	984.933.640	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MAYARAKAT VETERINER		PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN	1 Ha	984.933.640	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah hewan yang tertangan	10 %	1.916.225.301	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah hewan yang tertangan	10 %	1.916.225.301	
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	74.500 Ekor	1.916.225.301	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	74.500 Ekor	1.916.225.301	
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Wilayah	296.100.495	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Wilayah	296.100.495	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIKENDALIKAN DAN DITANGANI	1 Laporan	1.620.124.806	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIKENDALIKAN DAN DITANGANI	1 Laporan	1.620.124.806	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luasan Area Penanganan Gangguan Usaha Luasan Area Penanganan OPT dan DPI	1.000 Ha	1.119.098.862	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luasan Area Penanganan Gangguan Usaha Luasan Area Penanganan OPT dan DPI	1.000 Ha	1.119.098.862	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	300 Ha 700 Ha	1.119.098.862	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	300 Ha 700 Ha	1.119.098.862	
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	500 Ha	580.147.450	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	500 Ha	580.147.450	
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	200 Ha	295.281.788	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	200 Ha	295.281.788	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH USAHA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG DIAWASI DAN DIBINA	300 Ha	243.669.624	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH USAHA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG DIAWASI DAN DIBINA	300 Ha	243.669.624	
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang Dibina dan Diawasi	10 %	59.999.750	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang Dibina dan Diawasi	10 %	59.999.750	
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan pengawasan Penerapan Standard an Izin Usaha Pertanian	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawas	840 Unit	59.999.750	Pembinaan dan pengawasan Penerapan Standard an Izin Usaha Pertanian	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawas	840 Unit	59.999.750	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KELOMPOK TANI YANG MENDAPAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	1 Laporan	59.999.750	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KELOMPOK TANI YANG MENDAPAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	1 Laporan	59.999.750	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah penerapan teknologi dan inovasi perkebunan dan peternakan	10 %	3.721.960.358	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah penerapan teknologi dan inovasi perkebunan dan peternakan	10 %	3.721.960.358	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	15 Kegiatan	948.860.868	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	15 Kegiatan	948.860.868	
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelompok petani yang difasilitasi IG, sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan dan peternakan	12 Dokumen	948.860.868	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelompok petani yang difasilitasi IG, sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan dan peternakan	12 Dokumen	948.860.868	
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah korporasi petani yang didampingi	20 Kelompok	2.773.099.490	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah korporasi petani yang didampingi	20 Kelompok	2.773.099.490	
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Koorporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	2.673.099.690	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Koorporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	2.673.099.690	
3.27.0.00.0.00.01.0006	UPTD PERBENIHAN			7 Unit	99.999.800	UPTD PERBENIHAN			7 Unit	99.999.800	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN SARANA PERKEBUNAN			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN SARANA PERKEBUNAN			
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Kebun Sumber Benih dan Penangkar Benih yang Diawasi	1.300 Ha	139.792.000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Kebun Sumber Benih dan Penangkar Benih yang Diawasi	1.300 Ha	139.792.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	8 Unit	139.792.000	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	8 Unit	139.792.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN	1 Laporan	139.792.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN	1 Laporan	139.792.000	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Kebun Produksi yang Terpelihara	401 Ha	1.990.164.456	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Kebun Produksi yang Terpelihara	401 Ha	1.990.164.456	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	17 Unit	1.990.164.456	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	17 Unit	1.990.164.456	
3.27.0.00.0.00.01.0006	UPTD INSEMINASI BUATAN			1 Dokumen	1.990.164.456	UPTD INSEMINASI BUATAN			1 Dokumen	1.990.164.456	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PERSENTASE KENAIKAN RATARATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PERSENTASE KENAIKAN RATARATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)			
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Jumlah Kelahiran Ternak yang di Inseminasi Buatan	2,11 %	2.234.304.331	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Jumlah Kelahiran Ternak yang di Inseminasi Buatan	2,11 %	2.234.304.331	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	62 %	2.234.304.331	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	62 %	2.234.304.331	
3.27.0.00.0.00.01.0008	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1 Laporan	2.234.304.331	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1 Laporan	2.234.304.331	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN			
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah Pengujian Sampel Produk Hewan	10 %	965.307.892	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah Pengujian Sampel Produk Hewan	10 %	965.307.892	
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	900 Sampel	735.418.582	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	900 Sampel	735.418.582	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	200 Laporan	203.539.332	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	200 Laporan	203.539.332	
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan		Jumlah Unit Usaha yang diawasi	1 Dokumen	531.879.250	Kesejahteraan Hewan		Jumlah Unit Usaha yang diawasi	1 Dokumen	531.879.250	
3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner NKV		Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	102 Unit Usaha	229.889.310	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner NKV		Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	102 Unit Usaha	229.889.310	
3.27.0.00.0.00.01.0009	UPTD KLINIK HEWAN			10 Sertifikat	229.889.310	UPTD KLINIK HEWAN			10 Sertifikat	229.889.310	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN		PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN		PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	MASYARAKAT VETERINER					MASYARAKAT VETERINER					
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah hewan yang tertangani di UPTD Klinik Hewan	10 %	806.563.243	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah hewan yang tertangani di UPTD Klinik Hewan	10 %	806.563.243	
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Provinsi	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	4.000 Ekor	806.563.243	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Provinsi	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	4.000 Ekor	806.563.243	
3.27.0.00.0.00.01.0010	UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA LOBUSONA			1 Laporan	806.563.243	UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA LOBUSONA			1 Laporan	806.563.243	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PERSENTASE KENAIKAN RATARATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PERSENTASE KENAIKAN RATARATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)			
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Kelahiran Bibit Unggul di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona	2,11 %	2.171.292.969	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Kelahiran Bibit Unggul di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona	2,11 %	2.171.292.969	
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	80 %	2.171.292.969	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	80 %	2.171.292.969	
3.27.0.00.0.00.01.0011	UPTD TERNAK UNGGAS DAN SAPI SIHITANG			1 Laporan	2.171.292.969	UPTD TERNAK UNGGAS DAN SAPI SIHITANG			1 Laporan	2.171.292.969	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PERSENTASE KENAIKAN RATARATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PERSENTASE KENAIKAN RATARATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)			
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Kelahiran Bibit Unggul di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona	2,11 %	4.601.452.829	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Persentase Kelahiran Bibit Unggul di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona	2,11 %	4.601.452.829	
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	80 %	4.601.452.829	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Provinsi/ Kab./Kota	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	80 %	4.601.452.829	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan adalah suatu tahapan yang berkesinambungan yang dimulai dengan persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan Forum PD, perumusan rancangan akhir Renja, dan penetapan Renja. Perlu adanya analisis kebutuhan yang bertujuan menentukan program dan kegiatan dibutuhkan dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini penting dilakukan karena berbagai faktor antara lain :

1. Kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah;
2. Keterbatasan Anggaran dan lain-lain.

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 berdasarkan penelaahan usulan masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dan usulan pemangku kepentingan. Usulan tersebut dapat diterima sebab telah sesuai dengan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD. Usulan yang dapat diakomodir pada Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga teknis di bidang perkebunan dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah. Pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025-2029 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Visi Indonesia 2045 diwujudkan melalui RPJPN 2025-2045 mengusung visi Negara Nusantara Berdaulat Maju dan Berkelanjutan.
2. Visi Indonesia Emas 2045 menargetkan Indonesia mencapai sejumlah tujuan pembangunan, yakni pendapatan perkapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta intensitas GRK menurun menuju net zero emissions.
3. RPJPN 2025-2045 merumuskan 8 Misi Pembangunan, 17 Arah Pembangunan, dan 45 Indikator Pembangunan.
4. RPJPN 2025-2045 juga memuat 20 upaya transformatif super prioritas yang perlu dikawal oleh seluruh pelaku pembangunan hingga 20 tahun ke depan.
5. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional setiap 20 tahun, RPJPN digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang juga diturunkan menjadi dokumen perencanaan pembangunan nasional lima tahunan, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diturunkan menjadi dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
6. RPJMN 2025-2029 Teknokratik menjadi tahapan pembangunan pertama dalam RPJPN 2025-2045 yang bertujuan untuk Perkuatan Fondasi Transformasi, yakni pada Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, serta Landasan Transformasi, yaitu pada Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.
7. Transformasi dan Landasan Transformasi diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi, yaitu untuk mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta Kesiambungan Pembangunan.

8. RPJMN 2025-2029 mengamanatkan pembangunan wilayah, termasuk sarana dan prasarana, dilakukan secara tematik untuk memastikan pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia.
9. Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 disusun untuk selanjutnya diintegrasikan dengan visi, misi, dan program prioritas calon presiden dan wakil presiden.
10. RPJMN 2025-2029 disusun hingga Januari 2025, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yakni kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan publik.
11. RPJMN 2025-2029 berperan sebagai panduan perencanaan pembangunan nasional termasuk pendanaan dan indikatifnya, penugasan kinerja kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah, serta sebagai dasar sinkronisasi RKP pusat dan daerah.

Strategi pembangunan Tahun 2025 mengacu kepada tema RKP yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Pembangunan Sumatera Utara mengusung tema “**Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan**” dengan Tujuan dan Arah Pembangunan Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesetaraan Gender;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui penurunan Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, peningkatan Produktifitas dan Kesejahteraan Petani serta Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB;
3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan melalui peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan, Layanan Infrastruktur Permukiman, Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta Menurunkan Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah serta Ketangguhan Bencana;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas melalui Peningkatan Penilaian Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah, Keberlanjutan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peningkatan pelayanan publik yang prima.

Sesuai dengan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 serta tujuan dan arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara, maka Dinas Perkebunan dan Peternakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki tujuan Peningkatan Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan.

Mengacu pada tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yaitu:

a. Sasaran 1: Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan

Untuk sasaran 1 ini, yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah Persentase Peningkatan Produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) dan Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan. Produksi dan produktivitas komoditas perkebunan yang menjadi sasaran adalah produksi dan produktivitas untuk 24 (dua puluh empat) komoditas perkebunan rakyat.

b. Sasaran 2: Meningkatnya produksi ternak

Untuk sasaran 2 ini, yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah persentase peningkatan produksi daging, telur dan susu di Provinsi Sumatera Utara.

c. Sasaran 3: Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan dan peternakan

Untuk sasaran 3 ini, yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perkebunan, Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan, dan Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB).

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja		Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
						2024	2025			
1.	Tujuan, : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Tujuan : Peningkatan Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan								
	Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Sasaran 1: Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan	Persentase Peningkatan produksi komoditas perkebunan	(%)	1,06	2,57	2,57	Produksi adalah hasil yang dipanen dari usaha perkebunan tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut.	$\% = \{(Produksi\ 2025 -\ Production\ 2024)\} / Production\ 2024\} \times 100\ \%$	Kabupaten/ Kota se- Sumatera Utara
			Persentase peningkatan produktivitas komoditas perkebunan	(%)		2,32	2,42	Produktivitas komoditas perkebunan (Kg/Ha) adalah rasio antara produksi Tanaman Menghasilkan (TM) (Kg) dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM).	$\% = \{(Produktivitas\ 2025 -\ Produktivitas\ 2024)\} / Produktivitas\ 2024\} \times 100\ \%$	Kabupaten/ Kota se- Sumatera Utara
		Sasaran 2: Meningkatnya produksi ternak	Persentase peningkatan produksi daging	%	11,41 *	1,28	1,32	Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu.	$\% = \{(Jumlah\ Produksi\ Daging\ 2025 -\ Jumlah\ Produksi\ Daging\ 2024)\} / Jumlah\ Produksi\ Daging\ 2024\} \times 100\ \%$	Kabupaten/ Kota se- Sumatera Utara
			Persentase peningkatan produksi telur	%	9,28*	2,16	2,16	Produksi telur adalah jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, itik, burung puyuh dan itik manila) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan ke orang lain.	$\% = \{(Jumlah\ Produksi\ Telur\ 2025 -\ Jumlah\ Produksi\ Telur\ 2024)\} / Jumlah\ Produksi\ Telur\ 2024\} \times 100\ \%$	Kabupaten/ Kota se- Sumatera Utara

No.	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2023	Target Kinerja		Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data
						2024	2025			
			Persentase peningkatan produksi susu	%	3,14*	2,90	3,00	Produksi susu adalah jumlah air susu yang keluar dan sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan kepada orang lain	$\% = \{(\text{Jumlah Produksi Susu 2025} - \text{Jumlah Produksi Susu 2024}) / \text{Jumlah Produksi Susu 2024}\} \times 100 \%$	Kabupaten/ Kota se- Sumatera Utara
		Sasaran 3 : Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan dan peternakan	Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Perkebunan	Poin	159,89	156,11	159,93	Rasio antara indeks harga yang diterima petani/peternak (It) dengan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib).	$NTP = (It/Ib) \times 100$	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
			Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Peternakan	Poin	96,81	101,51	102,01	Rasio antara indeks harga yang diterima petani/peternak (It) dengan indeks harga yang dibayarkan petani/peternak (Ib).	$NTP = (It/Ib) \times 100$	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
			Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB)	%	13,92	13,33	13,46	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Sub Sektor Perkebunan adalah jumlah nilai tambah bruto (<i>gross value added</i>) yang timbul dari sub sektor perkebunan di wilayah Sumatera Utara	$\text{Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB)} = (\text{PDRB Sub Sektor Perkebunan} / \text{Total PDRB Sumatera Utara}) \times 100 \%$	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka Sementara

Dalam rangka pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2025 maka disusun stratregi sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana perkebunan dan peternakan
2. Penyediaan prasarana perkebunan dan peternakan
3. Pengendalian dan penanggulangan bencana
4. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
5. Pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan dan peternakan
6. Pengembangan penyuluhan
7. Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 merencanakan melaksanakan 7 (tujuh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan 4 (empat) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan yang sama sehingga pada rincian anggaran terdapat 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan. Adapun pagu anggaran sebesar Rp. 98.074.016.793,- (Sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah). Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 mempedomani Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025.

3.4. Dukungan Perangkat Daerah terhadap Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Kegiatan Strategis Daerah merupakan kebijakan daerah yang memiliki daya ungkit untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, dalam rangka mendukung salah satu prioritas pembangunan yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Dinas Perkebunan dan Peternakan melaksanakan 2 (dua) Kegiatan Strategis Daerah, yaitu:

Tabel 3.2.

Dukungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara terhadap Kegiatan Strategis Daerah

No.	Nama KSD	Target 2025
1.	Pembinaan Petani Muda Milenial "PMM"	45 Orang
2.	Peningkatan Produksi Hasil Ternak "Tanduk Ternak"	1,50%
3.	Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan "Induksi Perkebunan"	2,42%

3.5. Dukungan Perangkat Daerah terhadap Perencanaan Pendekatan Tematik

Pendekatan tematik merupakan perencanaan dengan pendekatan tertentu yang dilaksanakan dalam rangka memprioritaskan kegiatan untuk dapat mengakselerasi Upaya-upaya penanganan permasalahan dan target-target pembangunan daerah dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun perencanaan pendekatan tematik dalam Renja tahun 2025 adalah:

1. Penurunan Angka Stunting

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/801/KPTS/2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan stunting dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara juga mengalokasikan anggaran APBD untuk kegiatan penurunan stunting kabupaten /kota Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menyusun berbagai kegiatan lintas sektor dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Utara termasuk Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Adapun dukungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam menangani penurunan angka stunting dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Dukungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara terhadap Penurunan Angka Stunting

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Target
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat	Pemberian bantuan ternak unggas	800 ekor

2. Penurunan Angka Kemiskinan

Berdasarkan Permendagri nomor 53 tahun 2020 bahwasanya Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam RPKD mengacu kepada Strategi Kebijakan Nasional penanggulangan kemiskinan, yang kemudian kebijakan ini juga menjadi acuan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung penurunan angka kemiskinan dengan strategi meningkatkan pendapatan

melalui beberapa kegiatan. Adapun dukungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dalam menangani penurunan angka kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.

Dukungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
terhadap Penurunan Angka Kemiskinan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan
2.	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, Dan Sarana Pendukung Pertanian
3.	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman	Pengawasan Mutu Dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, Dan Perkebunan
4.	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengendalian Penyediaan Dan Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak
5..	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Pengendalian Dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
6.	Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pendampingan Dan Pengawalan Korporasi Petani
7.	Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Pembentukan Dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan perkebunan dan peternakan di Sumatera Utara perlu dukungan pendanaan dari berbagai pihak. Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran Provinsi dari Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, tetap akan difokuskan bagi Kabupaten/Kota yang memberikan perhatian dan didukung dengan pendanaan dari masing-masing Kabupaten/Kota, melalui berbagai kerjasama pendanaan untuk berbagai kegiatan di sektor yang berpedoman kepada fokus pembangunan perkebunan dan peternakan dalam mewujudkan tercapainya target-target pembangunan perkebunan dan peternakan Provinsi Sumatera Utara.

Dengan telah ditetapkannya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan di lengkapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan tersebut yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 merencanakan melaksanakan 7 (tujuh) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 98.074.016.793,- (Sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah). Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 mempedomani Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2025. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- i. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ii. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- iii. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- i. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- i. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- ii. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- iii. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- iii. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- iv. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- vi. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- i. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

- i. Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

b. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

- i. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
- ii. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (UPTD Perbenihan)

c. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

- i. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- ii. Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan
- iii. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (UPTD Inseminasi Buatan)

d. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor

- i. Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

e. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

- i. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona)
- ii. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (UPTD Ternak Unggas dan Sapi Sihitang)

3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

- i. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
- ii. Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (UPTD Perbenihan)

4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MAYARAKAT VETERINER

a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- i. Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan
- ii. Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- iii. Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan (UPTD Klinik Hewan)

b. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan

- i. Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan (UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner)
- ii. Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner)

c. Kegiatan Kesejahteraan Hewan

- i. Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner NKV (UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner)

5. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

- i. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- ii. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- iii. Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

6. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- i. Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penerapan Standard an Izin Usaha Pertanian

7. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

- i. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

- i. Sub Kegiatan Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
- ii. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara serta pendanaannya dapat dilihat pada lampiran (Tabel T.C.33)

Tabel 4.1 (Tabel T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cacatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN								
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				98.074.016.793				107.999.858.940
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI		100 %	56.556.339.053			100 %	62.211.972.958
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan kinerja		12 Bulan	1.359.496.585			12 Bulan	1.495.446.244
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	7 Dokumen	446.413.715	PAD		7 Dokumen	491.055.087
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	5 Laporan	913.082.870	PAD		5 Laporan	1.004.391.157
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas keuangan		12 Bulan	37.402.038.430			12 Bulan	41.142.242.273
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	250 Orang/ Bulan	36.629.984.430	PAD dan DAU		250 Orang/ Bulan	40.292.982.873
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi	1 Dokumen	638.284.000	PAD		1 Dokumen	702.112.400
3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi	1 Dokumen	133.770.000	PAD		1 Dokumen	147.147.000
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaporan Barang Milik Daerah		12 Bulan	92.998.080			12 Bulan	102.297.888
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	1 Laporan	92.998.080	PAD		1 Laporan	102.297.888
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pegawai		12 Bulan	879.372.180			12 Bulan	967.309.398
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi	4 Paket	256.044.000	PAD		4 Paket	281.648.400
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi	250 Orang	463.097.180	PAD		250 Orang	509.406.898
3.27.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi	60 Orang	160.231.000	PAD		60 Orang	176.254.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Layanan Sarana Aparatur		12 Bulan	2.074.199.852			12 Bulan	2.281.619.837
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Provinsi	12 Paket	46.937.890	PAD		12 Paket	51.631.679
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi	3 Paket	728.847.230	PAD		3 Paket	801.731.953
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi	2 Paket	101.942.200	PAD		2 Paket	112.136.420
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan yang Disediakan	Provinsi	10.080 Dokumen	44.640.000	PAD		10.080 Dokumen	49.104.000
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	1 Laporan	704.000.000	PAD		1 Laporan	774.400.000
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi	1 Dokumen	447.832.532	PAD		1 Dokumen	492.615.785
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bulan	1.582.897.481			12 Bulan	1.741.187.229
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Provinsi	100 Unit	1.582.897.481	PAD		100 Unit	1.741.187.229
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	9.606.789.000			12 Bulan	10.567.467.900
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi	1 Laporan	700.000.000	PAD		1 Laporan	770.000.000
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi	1 Laporan	8.906.789.000	PAD		1 Laporan	9.797.467.900
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Prasarana Aparatur		12 Bulan	3.558.547.445			12 Bulan	3.914.402.190
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Provinsi	20 Unit	599.688.070	PAD		20 Unit	659.656.877
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi	120 Unit	78.750.000	PAD		120 Unit	86.625.000
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Provinsi	5 Unit	2.880.109.375	PAD		5 Unit	3.168.120.313

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN SARANA PERKEBUNAN		1.300 Ha	9.356.425.261			1.300 Ha	10.292.067.787
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi alsintan dan pupuk		1.300 Ha	4.067.333.811			1.300 Ha	4.474.067.192
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Provinsi/ Kab./Kota	1 Laporan	4.067.333.811	PAD		1 Laporan	4.474.067.192
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah luas lahan perkebunan yang difasilitasi bibit tanaman		1.300 Ha	5.289.091.450			1.300 Ha	5.818.000.595
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Provinsi/ Kab./Kota	1 Laporan	5.289.091.450	PAD		1 Laporan	5.818.000.595
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)		2,11 %	11.252.944.274			2,11 %	12.595.172.533
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok dan UPTD yang Difasilitasi		127 Unit	11.252.944.274			127 Unit	12.378.238.701
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang diproduksi	Provinsi/ Kab./Kota	1 Laporan	11.127.944.484	PAD		1 Laporan	12.240.738.932
3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Provinsi/ Kab./Kota	1.000 Dokumen	124.999.790	PAD		1.000 Dokumen	137.499.769
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH USAHA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG DIAWASI DAN DIBINA		10 %	197.212.574			10 %	216.933.831
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah Pengawasan peredaran obat Hewan di tingkat distributor		15 Unit	197.212.574			15 Unit	216.933.831
3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Provinsi/ Kab./Kota	1 Laporan	197.212.574	PAD		1 Laporan	216.933.831

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATA-RATA POPULASI TERNAK (EKOR)		1,5 %	984.933.640			1,5 %	984.933.640
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Kelompok, UPTD dan Laboratorium yang Difasilitasi		33 Unit	984.933.640			33 Unit	984.933.640
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Provinsi/ Kab./Kota	1 Ha	984.933.640	PAD		1 Ha	984.933.640
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MAYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN		10 %	1.916.225.301			10 %	2.107.847.831
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah hewan yang tertangan		74.500 Ekor	1.916.225.301			74.500 Ekor	2.107.847.831
3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Provinsi/ Kab./Kota	1 Wilayah	296.100.495	PAD		1 Wilayah	325.710.545
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi/ Kab./Kota	1 Laporan	1.620.124.806	PAD		1 Laporan	1.782.137.287
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIKENDALIKAN DAN DITANGANI		1.000 Ha	1.119.098.862			1.000 Ha	1.231.008.748
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luasan Area Penanganan Gangguan Usaha Luasan Area Penanganan OPT dan DPI		300 Ha 700 Ha	1.119.098.862			300 Ha 700 Ha	1.231.008.748
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Provinsi/ Kab./Kota	500 Ha	580.147.450	PAD		500 Ha	638.162.195
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Provinsi/ Kab./Kota	200 Ha	295.281.788	PAD		200 Ha	324.809.967
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Provinsi/ Kab./Kota	300 Ha	243.669.624	PAD		300 Ha	268.036.586

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH USAHA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN YANG DIAWASI DAN DIBINA		10 %	59.999.750			10 %	65.999.725
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang Dibina dan Diawasi		840 Unit	59.999.750			840 Unit	65.999.725
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan pengawasan Penerapan Standard an Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawas	Provinsi/ Kab./Kota	1 Laporan	59.999.750	PAD		1 Laporan	65.999.725
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KELOMPOK TANI YANG MENDAPAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN		10 %	3.721.960.358			10 %	4.094.156.394
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penerapan teknologi dan inovasi perkebunan dan peternakan		15 Kegiatan	948.860.868			15 Kegiatan	1.043.746.955
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Provinsi/ Kab./Kota	12 Dokumen	948.860.868	PAD		12 Dokumen	1.043.746.955
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok petani yang difasilitasi IG, sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan dan peternakan		20 Kelompok	2.773.099.490			20 Kelompok	3.050.409.439
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Provinsi/ Kab./Kota	1 Unit	2.673.099.690	PAD dan DBH - CHT		1 Unit	2.940.409.659
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	Provinsi/ Kab./Kota	7 Unit	99.999.800	PAD		7 Unit	109.999.780
3.27.0.00.0.00.01.0006	UPTD PERBENIHAN								
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN SARANA PERKEBUNAN		1.300 Ha	139.792.000			1.300 Ha	153.771.200
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Kebun Sumber Benih dan Penangkar Benih yang Diawasi		8 Unit	139.792.000			8 Unit	153.771.200
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat	Provinsi/ Kab./Kota	1 Laporan	139.792.000	PAD		1 Laporan	153.771.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga							
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN YANG DIFASILITASI KETERSEDIAAN PRASARANA PERKEBUNAN		401 Ha	1.990.164.456			401 Ha	2.189.180.902
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Kebun Produksi yang Terpelihara		17 Unit	1.990.164.456			17 Unit	2.189.180.902
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Provinsi/ Kab./Kota	1 Dokumen	1.990.164.456	PAD		1 Dokumen	2.189.180.902
3.27.0.00.0.00.01.0006	UPTD INSEMINASI BUATAN								
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATARATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)		2,11 %	2.234.304.331			2,11 %	2.457.734.764
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kelahiran Ternak yang di Inseminasi Buatan		62 %	2.234.304.331			62 %	2.457.734.764
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	Provinsi/ Kab./Kota	1 Laporan	2.234.304.331	PAD		1 Laporan	2.457.734.764
3.27.0.00.0.00.01.0008	UPTD KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN		10 %	965.307.892			10 %	1.061.838.681
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengujian Sampel Produk Hewan		900 Sampel	735.418.582			900 Sampel	808.960.440
3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Provinsi/ Kab./Kota	200 Laporan	203.539.332	PAD		200 Laporan	223.893.265
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Provinsi/ Kab./Kota	1 Dokumen	531.879.250	PAD		1 Dokumen	585.067.175
3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Unit Usaha yang diawasi		102 Unit Usaha	229.889.310			102 Unit Usaha	252.878.241

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner NKV	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)		10 Sertifikat	229.889.310	PAD		10 Sertifikat	252.878.241
3.27.0.00.0.00.01.0009	UPTD KLINIK HEWAN								
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN		10 %	806.563.243			10 %	887.219.567
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang tertangani di UPTD Klinik Hewan		4.000 Ekor	806.563.243			4.000 Ekor	887.219.567
3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Provinsi	1 Laporan	806.563.243	PAD		1 Laporan	887.219.567
3.27.0.00.0.00.01.0010	UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA LOBUSONA								
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATARATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)		2,11 %	2.171.292.969			2,11 %	2.388.422.266
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Kelahiran Bibit Unggul di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona		80 %	2.171.292.969			80 %	2.388.422.266
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Provinsi/ Kab./Kota	1 Laporan	2.171.292.969	PAD		1 Laporan	2.388.422.266
3.27.0.00.0.00.01.0011	UPTD TERNAK UNGGAS DAN SAPI SIHITANG								
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KENAIKAN RATARATA PRODUKSI TERNAK (PERSEN)		2,11 %	4.601.452.829			2,11 %	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Kelahiran Bibit Unggul di UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobusona		80 %	4.601.452.829			80 %	5.061.598.112
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Provinsi/ Kab./Kota	1 Laporan	4.601.452.829	PAD		1 Laporan	5.061.598.112

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang memuat rencana dalam kurun waktu satu tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara telah memperhatikan permasalahan dan hambatan, juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan terhadap pembangunan perkebunan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2025.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung tujuan dan sasaran Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Sekretariat, Bidang-bidang/ UPTD dan seluruh staf Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

KEPALA DINAS

M. ZAKIR SYARIF DAULAY, S.Hut, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19761115 200112 1 003